

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di HSS (Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah)

Oleh :

Ahmadi Murjani, SST, MPP, Ph.D

H. Muhammad Afif Bizri, SH, M. Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.

Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang merupakan rangkuman tujuh belas tujuan yang disepakati oleh lebih dari seratus sembilan puluh negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB. Salah satu tujuan utama yang menjadi fokus oleh negara-negara di dunia dalam SDGs adalah tanpa kemiskinan (*no poverty*) sehingga tidak ada lagi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem di seluruh dunia.

Kemiskinan ekstrem pada dasarnya dihitung berbasis kebutuhan dasar, dimana Bank Dunia mengambil informasi tentang kebutuhan dasar yang dikumpulkan dari 15 negara termiskin dan dirata-ratakan. Sehingga hasilnya diperoleh sekitar 1,90 dollar AS per hari per orang sebagai garis kemiskinan ekstrem global. Sehingga penduduk dapat dikatakan berada dalam kemiskinan ekstrem apabila berada di bawah kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (*Purchasing Power Parity*). Adapun untuk tahun 2024 setara dengan Rp. 11.924,13 per kapita per hari atau Rp. 362.692,14 per kapita per bulan.

Menuju Kemiskinan Ekstrem 0%

Pada 4 Maret 2020, Presiden Jokowi menetapkan target "angka kemiskinan ekstrem Indonesia menjadi nol persen di akhir tahun 2024".

Angka tersebut merujuk pada ketetapan United Nations (Persatuan Bangsa Bangsa – PBB) yang mencanangkan target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2030, seperti yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan akses kebutuhan dasar: pendidikan rendah, kesehatan menurun, tidak ada akses air/sanitasi bersih, menempati tempat tinggal tidak layak, tidak produktif dan pendapatan rendah.

Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara Nasional dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Strategi dan Program ini juga harus dilaksanakan di Daerah, Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Ringkasan

Secara umum kemiskinan ekstrem dihitung berbasis kebutuhan dasar, dimana Bank Dunia mengambil informasi tentang kebutuhan dasar yang dikumpulkan dari 15 negara termiskin dan dirata-ratakan. Sehingga hasilnya diperoleh sekitar 1,90 dollar AS per hari per orang sebagai garis kemiskinan ekstrem global. Sehingga penduduk dapat dikatakan berada dalam kemiskinan ekstrem apabila berada di bawah kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (*Purchasing Power Parity*). Adapun untuk tahun 2024 setara dengan Rp. 11.924,13 per kapita per hari atau Rp. 362.692,14 per kapita per bulan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam beberapa tahun terakhir sangat fokus dalam Upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu, dengan melakukan berbagai program kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas sektor.

Angka kemiskinan di Kab. HSS terus mengalami penurunan secara konsisten, dan puncaknya pada tahun 2023 angka kemiskinan Kab. HSS berhasil di angka 4,01% serta berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan yang mana di angka 4,29%. Dan pada tahun 2024 kemiskinan di HSS menjadi 3,38% dan dengan kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terus membaik.

Persentase penduduk miskin ekstrem Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar 0,65%. Mengalami penurunan kalau dibandingkan di tahun 2022 yang sebesar 0,78% (turun sebesar 0,13% poin). Namun kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Selatan maka Kab. HSS masih berada di atas angka Provinsi yang mana di angka 0,65% di tahun 2023. Kab. HSS berada di urutan ke-6 dari 13 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menyatakan bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi : pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Penanggulangan ini dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions* dengan rekomendasi umum untuk penganggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui : **Integrasi Program** dengan koordinasi lintas sektor dan integrasi program (program *cross-cutting*). **Optimalisasi Data** Regsosek (dan updatingsnya) untuk memastikan bantuan dan intervensi yang tepat sasaran. Manajemen dari **Hulu Hilir** Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam beberapa tahun terakhir sangat fokus dalam Upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu, dengan melakukan berbagai program kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas sektor.

Hasilnya angka kemiskinan di Kab. HSS terus mengalami penurunan secara konsisten, dan puncaknya pada tahun 2023 angka kemiskinan Kab. HSS berhasil di angka 4,01% serta berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan yang mana di angka 4,29%. Dan pada tahun 2024 kemiskinan di HSS menjadi 3,38% dan dengan kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terus membaik.

Adapun kalau dilakukan perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2024 angka kemiskinan Kab. HSS berada di 3 terendah, setelah Kabupaten Banjar di angka 2,36%, dan Kabupaten Tapin di angka 3,33%.

Kab. HSS juga tercatat dengan penurunan ke 2 tertinggi dengan -0,63% poin, setelah Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka -0,71% poin. Dibalik itu ada 3 Kabupaten yang mengalami kenaikan yaitu Kabupaten Tapin, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Laut.

Persentase penduduk miskin ekstrem Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar 0,65%. Mengalami penurunan kalau dibandingkan di tahun 2022 yang sebesar 0,78% (turun sebesar 0,13% poin).

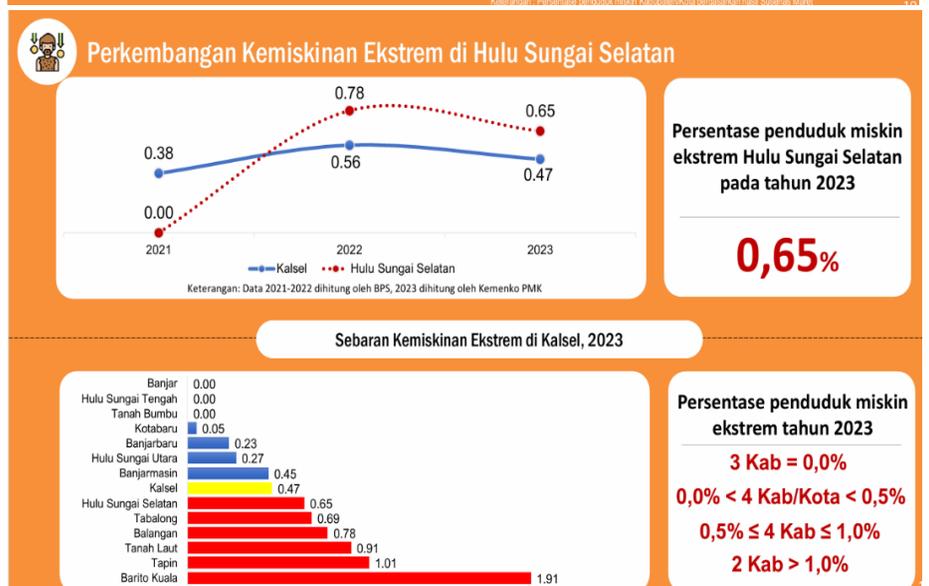
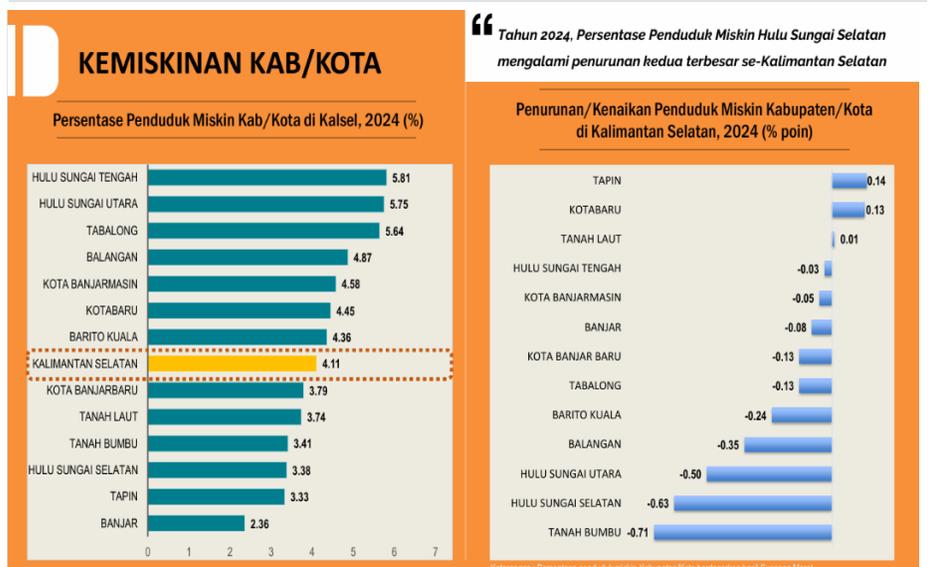
Namun kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Selatan maka Kab. HSS masih berada di atas angka Provinsi yang mana di angka 0,65% di tahun 2023.

Kab. HSS berada di urutan ke 6, dimana yang tertinggi adalah Kabupaten Barito Kuala sebesar 1,91%, Kabupaten Tapin 1,01%, Kabupaten Tanah Laut 0,91%, Kabupaten Balangan 0,78%, Kabupaten Tabalong 0,69%.

Kalau dilihat data distribusi penduduk di tiap quintile di HSS tahun 2024 (quintile merupakan induk desil, dimana quintile 1 memuat desil 1 dan 2, dst). Terlihat distribusi dan pergerakan kemiskinan dan kesejahteraan di setiap quintile yang ada.

Terjadi penurunan di quintile 2 mengindikasikan bahwa sebagian besar yang berpindah adalah yang mengalami perbaikan ekonomi / kesejahteraan.

Quintile 1 mengalami sedikit kenaikan dari 26,8% menjadi 27,1% (+0,3 poin persen), yang menunjukkan bahwa kelompok termiskin (ekstrem, miskin dan hampir miskin) tidak mengalami pergerakan signifikan.



Distribusi Penduduk Tiap Quintile di HSS, 2024

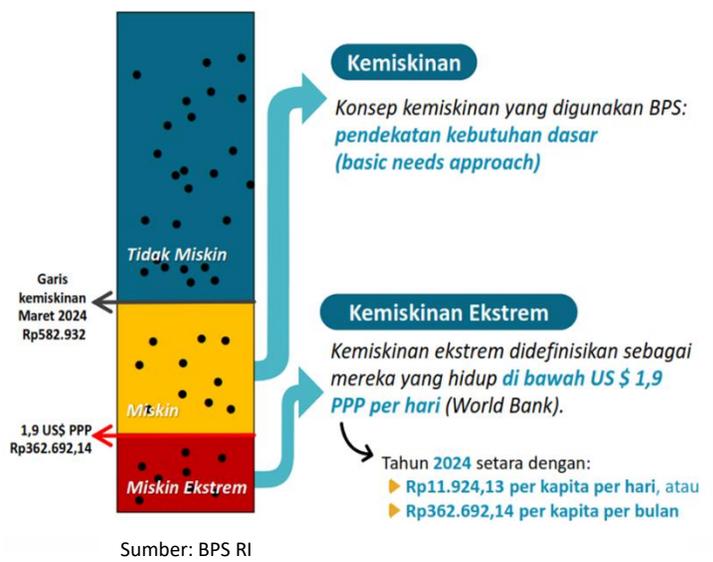
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
% Share 2023	26.8	32.4	14.9	12.1	13.8
% Share 2024	27.1	25.1	17.6	15.7	14.5
Perubahan (% poin)	0.3 ↑	-7.3 ↓	2.7 ↑	3.6 ↑	0.7 ↑

- Peningkatan proporsi di Q3 dan Q4 menunjukkan pertumbuhan menuju kelas lebih tinggi.
- Penurunan di Q2 mengindikasikan bahwa sebagian besar yang berpindah adalah kelompok yang mengalami perbaikan ekonomi, bukan penurunan.
- Q1 hanya mengalami sedikit kenaikan dari 26,8% menjadi 27,1% (+0,3 poin persen), yang menunjukkan bahwa kelompok termiskin tidak mengalami pergerakan signifikan.
- Kenaikan pada Q5, menunjukkan bahwa meski ada perbaikan kesejahteraan, pertumbuhan di kelompok atas tidak jauh lebih cepat dibanding kelompok di bawahnya (Q3 dan Q4).

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan – Susenas 2023-2024 diolah dengan ADePT

Sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem BPS ditugaskan untuk melakukan evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi masyarakat.

Kemiskinan ekstrem dilakukan pendekatan berbasis kebutuhan dasar, dimana Bank Dunia mengambil informasi tentang kebutuhan dasar sekitar 1,90 dollar AS per hari per orang sebagai garis kemiskinan ekstrem global. Sehingga penduduk dapat dikatakan berada dalam kemiskinan ekstrem apabila berada di bawah kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (*Purchasing Power Parity*). Adapun untuk tahun 2024 di Indonesia setara dengan Rp. 11.924,13 per kapita per hari atau Rp. 362.692,14 per kapita per bulan



Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menyatakan bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi : pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Rekomendasi untuk penganggulangan kemiskinan ekstrem dengan integrasi program, optimalisasi data, melakukan program yang berkelanjutan dan melakukan evaluasi atas program dan senantiasa melakukan perbaikan.

Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: Kemenko PMK

Strategi kebijakan yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dapat dirancang secara terpadu melalui berbagai program dan intervensi pemerintah. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan agar daya beli mereka meningkat. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan: Subsidi dan Bantuan Sosial baik reguler dan khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, Program Kartu Sembako untuk membantu kebutuhan pangan, Subsidi energi (BBM, listrik, gas) bagi kelompok rentan.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga miskin melalui berbagai kebijakan peningkatan pendapatan. Strategi ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan murah melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), Pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis dan Akses pemasaran produk UMKM melalui e-commerce dan marketplace.

Langkah lain juga dengan Peningkatan Keterampilan dan Lapangan Kerja melalui ; Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industry, Program padat karya bagi pekerja informal dan pengangguran, Insentif pajak dan investasi bagi industri yang menciptakan lapangan kerja besar.

Mendorong Ekonomi Kreatif dan Digital dengan Pelatihan digitalisasi UMKM dan industri kreatif, Peningkatan akses internet dan infrastruktur digital di daerah terpencil.

3. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah daerah yang menjadi pusat kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Strategi ini dilakukan bisa dengan Pembangunan Infrastruktur Dasar di Daerah Tertinggal seperti ; Penyediaan listrik, air bersih, dan jalan di daerah terpencil, Pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah miskin. Sehingga dapat menciptakan akses layanan dasar yang terjangkau, seperti : Pendidikan gratis hingga tingkat menengah dan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin, BPJS Kesehatan gratis bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan Program rumah layak huni atau subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perlu juga kebijakan transportasi publik yang terjangkau (subsidi tarif transportasi massal bagi masyarakat miskin) dengan pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien dan murah.

Pemerataan Ekonomi melalui Pembangunan Wilayah, meningkatkan investasi dan industri di luar kota besar, mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui program seperti Desa Wisata dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), serta Insentif bagi industri yang membuka lapangan kerja di daerah miskin.

Melakukan Rehabilitasi Kawasan Kumuh Perkotaan dengan melaksanakan relokasi dan pembangunan perumahan terjangkau bagi warga miskin kota dan program padat karya untuk memperbaiki lingkungan permukiman kumuh.

Ketiga strategi di atas harus diterapkan secara bersinergi agar dampaknya lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tepat sasaran dengan sistem pendataan yang baik serta koordinasi antar sektor yang optimal.

Penanggulangan ini dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions* dengan rekomendasi umum untuk penganggulangan Kemiskinan Ekstrem sebagai berikut :

Integrasi Program

Koordinasi lintas sektor dan integrasi program (program *cross-cutting*). Seperti : Program “Petani Mandiri”, dimana ruta miskin ekstrem yang menerima bansos juga mendapat pendampingan untuk mengelola usaha pertanian kecil dengan akses modal dan pasar; kemitraan antara petani miskin ekstrem tersebut dengan BUMDes untuk menjamin pemasaran hasil produksi. Stakeholders: Dinas Pertanian (pelatihan pertanian), Dinas Koperasi UMKM (pengembangan koperasi tani dan modal usaha mikro), Dinas Ketenagakerjaan (skema padat karya produktif sektor pertanian), dan Dinas Sosial (integrasi dengan bansos agar tepat sasaran dan masuk sektor produktif).

Optimalisasi Data

Pemanfaatan data terupdate dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tersalurkan ke rumah tangga sasaran. Optimalisasi Data Regsosek (dan updatingnya) untuk memastikan bantuan dan intervensi yang tepat sasaran secara BNBA dengan dilakukan monitoring berbasis data, dimana kondisi Hulu Sungai Selatan tahun 2024 Penduduk di Kuintil 1 (Q1) mengalami kenaikan tipis 0,3% poin, yang artinya kelompok miskin belum banyak mengalami mobilitas ke Kuintil lebih tinggi. Sehingga membutuhkan intervensi lebih signifikan.

Hulu Hilir

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang sesuai dengan program pemerintah pusat sehingga terjadi penyelarasan dan sinergi antara pusat dan daerah. Pada sektor hulu, dilakukan program yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan perlindungan. Sedangkan di hilir, dilakukan evaluasi atas program dan senantiasa melakukan perbaikan. Sehingga dapat menjamin adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat (moneter dan multidimensi) dan munculnya kemandirian.